

---

## POLITISASI BIROKRASI PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 (STUDI KASUS DINAS PENDIDIKAN KONAWE UTARA)

**Rahman Ako<sup>1\*</sup>, Farhan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>, Universitas Halu Oleo

\*Email Korespondensi: rahmanakofisip@uho.ac.id

---

### **Abstract :**

**Abstract:** *This research aims to determine bureaucratic politicization and the factors of bureaucratic politicization after the 2020 Regional Head Election at the North Konawe Regency Education Service. This type of research uses qualitative research methods. Data collection in this research was interviews and documentation. Meanwhile, data analysis techniques use data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research on Bureaucratic Politicization After the 2020 Regional Head Election (Case Study of the North Konawe Education Service) are 1) Massive replacement of structural officials who are intervened by politics, there is transactional politics or reward politics in the placement of officials in certain positions in Regional Government ranks, and the marginalization of Baperjakat in the mechanism for placing positions in Regional Government ranks is precisely the opposite of the mechanism that should be carried out in accordance with established regulations. 2) Factors that influence the politicization of bureaucracy that occurs in the North Konawe Regency Education Service, include: The power or political interests of regional heads, patron client relationships between Regional Heads and their bureaucrats as a form of bureaucrat loyalty to their leaders in exchange for higher positions or just to secure the position of these bureaucrats in the ranks of the Government, nuances of nepotism are still strongly felt in the placement of positions within the Regional Government, and the strengthening of Neo Feudalism or the inheritance of power which is carried out is based on expanding its power for the next period.*

**Keywords:** *Politicization, Bureaucracy, Pilkada*

### **Abstrak :**

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Politisasi Birokrasi dan faktor – faktor politisasi birokrasi Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Utara. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian Politisasi Birokrasi Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Kasus Dinas Pendidikan Konawe Utara) yaitu 1) Pergantian pejabat struktural secara besar-besaran yang diintervensi oleh politik, adanya politik transaksional atau politik balas jasa dalam penempatan pejabat-pejabat di posisi tertentu dalam jajaran Pemerintah Daerah, dan marginalisasi Baperjakat dalam mekanisme penempatan jabatan di jajaran Pemerintah Daerah justru kebalikan dari mekanisme yang seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 2) Faktor -faktor yang mempengaruhi politisasi birokrasi yang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Utara, antara lain: Kepentingan kekuasaan atau politik kepala daerah, hubungan patron client antara Kepala Daerah dan para birokratnya sebagai bentuk loyalitas birokrat terhadap pemimpinnya dengan imbalan jabatan yang lebih tinggi atau sekedar mengamankan posisi birokrat tersebut dalam jajaran Pemerintah, nuansa nepotisme yang masih kental terasa dalam penempatan jabatan-jabatan dalam lingkungan Pemda, dan menguatnya Neo Feodalisme atau pewarisan kekuasaan yang dilakukan didasarkan untuk memperluas kekuasaannya untuk periode berikutnya.

**Kata Kunci:** Politisasi, Birokrasi, Pilkada

---

## PENDAHULUAN

Penataan sumber daya manusia (SDM) pada organisasi pemerintah berbentuk mutasi sebagai perwujudan dari dinamika organisasi. Menurut Mas'udi dalam (Hidayati,2012) Mutasi adalah kegiatan pemindahan pegawai dari suatu pekerjaan kepekerjaan lain, Pegawai Negeri Sipil dapat berpindah antar jabatan fungsional maupun jabatan struktural di instansi pusat dan instansi daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. Ruang lingkup mutasi menurut Hasibuan dikutip (Kasiaheng, Kimbal, & Liando, 2017) mencakup semua perubahan baik posisi, pekerjaan, tempat karyawan, baik secara horizontal maupun vertikal (promosi dan demosi) yang dilakukan karena alasan personal transfer ataupun production transfer di dalam suatu organisasi.

Mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan instrumen yang penting untuk melakukan manajemen terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk menjunjung tinggi kompetensi, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan pertimbangan gaji yang sepadan Mas'udi dalam (Hidayati, 2012). Tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan kegiatan mutasi Pegawai Negeri Sipil di tingkat daerah atas intruksi kepala daerah. Mutasi pegawai diselenggarakan oleh Bidang Mutasi dan Promosi, yang menangani dan mengelola aktivitas perpindahan Pegawai Negeri Sipil baik di dalam instansi di lingkungan pemerintah kabupaten, dan perpindahan antar instansi baik masuk atau keluar dari Kabupaten. Sedangkan mutasi jabatan struktural adalah perubahan posisi jabatan struktural PNS baik secara vertikal maupun horizontal, dan kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Utara.

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan kepala daerah sebagai pejabat politik dan pejabat administrasi (birokrasi), kepala daerah yang memperoleh mandat dan legitimasi demokratis karena dipilih langsung, memerlukan dukungan staf administrasi yang profesional dan loyal, demi mewujudkan program-program yang dijanjikan kepada rakyat. Pegawai yang dibutuhkan yang pola pikir, pola sikap melayani,berbudaya produktif, serta mampu menjalankan manajemen berbasis kinerja yang berorientasi kepada pelayanan prima terhadap masyarakat (Iskandar, 2016) guna mewujudkan visi dan misi daerah yang harusdicapai.

Unsur politis dan subjektifitas seringkali mendominasi dalam setiap pengisian jabatan struktural PNS ini berkaitan dengan (Salim, 2015) birokrasi untuk mengeksitensikan semangat meraih dukungan politik dari masyarakat ataupun kelompok etnisnya. Hal inilah yang semakin memicu pandangan negatif publik bahwa untuk menempatkan seorang PNS dalam jabatan strukturalnya lebih ditentukan oleh faktor like or dislike pejabat politik dan juga berkaitan dengan kultural masyarakat Indonesia (Hasan, 2012). Mutasi pejabat struktural juga dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Utara mengikuti Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural; Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Berikut mekanisme penempatan dalam jabatan PNS/ASN berdasarkan PP. No. 13/2002; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam implementasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Utara menjalankan mekanisme penempatan dalam jabatan untuk Pegawai Negeri Sipil adanya berperan besar Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam memberikan pertimbangan layak tidaknya seseorang dipromosikan atau dimutasikan. Namun demikian, dalam proses mutasi juga tidak dapat dilakukan secara sewenang-

wenang mengingat dalam UU ASN No. 5 Tahun 2014 kebijakan mutasi ASN harus berdasarkan kompetensi, prestasi kerja, jenjang pangkat, tanpa diskriminasi, dan loyalitas (Ruitan, Mantiri, & Kairupan, 2018), (Tampilang, Sambiran, & Pangemeian, 2019).

Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Kebijakan mutasi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara mendapat sorotan, hal ini karena kebijakan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang melakukan mutasi PNS kurang transparan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan mutasi jabatan yang sejatinya dimaknai sebagai satu perubahan posisi/jabatan/tempat /pekerjaan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Prinsip mutasi adalah memindahkan pegawai kepada posisi yang tepat dan pekerjaan yang sesuai agar semangat dan produktivitas kerjanya meningkat. Sementara itu promosi dimaknai sebagai perpindahan pegawai ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilannya semakin besar.

Setelah Pemilihan Kepala Daerah, kegiatan mutasi jabatan justru jauh dari prinsip profesionalitas dan proporsionalitas karena adanya keterlibatan politik aparatur birokrasi (Romli, 2017). Hal itu dapat dilihat dari penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan, penempatan jabatan yang belum memenuhi kualifikasi masa kerja, pangkat dan golongan serta pemberhentian pejabat secara tiba-tiba dengan menempatkannya sebagai staf biasa/fungsional umum pada organisasi perangkat daerah

Pada Tahun 2020 mutasi besar-besaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Utara hal itu berdasarkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati tahun 2021 tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan kepala sekolah lingkup Pemerintah Kabupaten Konut dengan melantik 4 Kepala TK Paud, 48 Kepala Sekolah SD dan 5 Kepala Sekolah SMP Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 255 tahun 2021 tentang pemindahan/mutasi guru dan Kepala Sekolah SD dan SMP pendidik dan tenaga Pendidikan lingkup Dikbud Konut hal ini penulis beranggapan bahwa pegawai/guru yang dimutasi tidak memilih Ruksamin Pada Pemilihan Kepala Daerah Konut. Tahun 2020 adalah periode ke 2 (dua) Bupati Ruksamin, tentu saja geliat Pilkada dengan beragam dinamika di dalamnya turut mempengaruhi kebijakan mutasi jabatan ASN di Kabupaten Konawe Utara pada periode tersebut. Hal ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh (Nurprojo, 2014) terjadi politisasi birokrasi, ini menyeret birokrasi ke kondisi masih terikat dengan budaya birokrasi masa lalu yang sangat patrimonial dan otoritarian dengan rendahnya kedewasaan berperilaku kalangan birokrat yang secara pragmatisme birokrat mengejar kekuasaan dalam memanfaatkan potensi otonomi daerah untuk mencapai banyak kepentingan (Nuraini, 2017).

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik dengan kajian ini adalah apakah perombakan birokrasi yang dilakukan oleh kepala daerah terpilih Kabupaten Konawe Utara tersebut telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perundang-undangan ataukah memang terbukti adanya unsur politik yang melatar belakangi terjadinya perombakan birokrasi, yang tentu saja akan berdampak negatif terhadap perkembangan karir pegawai yang bersangkutan.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian ini akan memaparkan bagaimana Politisasi Birokrasi Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhi politisasi birokrasi pasca pemilihan kepala daerah tahun 2020 pada Dinas

Pendidikan Kabupaten Konawe Utara berdasarkan karakteristik permasalahan, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menguji konteks secara keseluruhan, interaksi dan partisipan dan mengumpulkan data secara langsung terhadap partisipan serta bergantung pada data-data deskriptif ( Moleong 2000 :1)

Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang, perwakilan dari guru yang dimutasi dan dipindah tugaskan 5 orang dan dari BKPSDM 1 Orang, yang paham problem penelitian yang ingin diteliti serta dimanfaatkan buat menyampaikan informasi perihal situasi serta kondisi latar belakang penelitian.

Data pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan fenomena yang ada, yaitu keadaan yang terjadi pada saat penelitian. Tujuan dari penelitian deskriptif yang sama ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih langsung dan tepat dari sumber yang di peroleh serta data yang di pergunakan dalam penelitian ini. Data primer merupakan data utama untuk survey. Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan data untuk mendukung fakta yang ditemukan di lapangan, Setelah melalui proses wawancara dengan narasumber, peneliti menemukan data berupa data Politisasi Birokrasi Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhi politisasi birokrasi pasca pemilihan kepala daerah tahun 2020 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Utara. Peneliti turun langsung dilapangan untuk mengumpulkan semua data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara dan dokumentasi foto pada saat wawancara. Sedangkan data sekunder yaitu di dalam penelitian melakukan studi pustaka. dengan mengumpulkan berbagai data dari peneliti sebelumnya. Misalnya jurnal, buku, dan contoh risalah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana digambarkan oleh Miles dan Huberman (1992:20) ( Bilu & Tunda, 2023 ; .Husain et al.,2020; Suaib et al., 2023; Harjudin, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Politisasi Birokrasi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Utara.**

#### **a). Pergantian Pejabat Struktur Secara Besar – Besaran**

Salah satu tujuan dari globalisasi adalah menciptakan hubungan yang interkoneksi. Efek dari globalisasi adalah kebiasaan hidup lokal menimbulkan pengaruhnya secara global. Begitupun dalam k Pergantian pejabat yang dilakukan pasca pemilihan kepala daerah di Kabupaten Konawe Utara merupakan konsekuensi politik yang didapatkan oleh orang-orang yang tidak memilih Ruksamin – Abu Haera pada pemilihan Kepala Daerah. Orang – orang yang menjadi Kepala Sekolah di mutasi menjadi guru biasa dan yang gantikan sebagai Kepala Sekolah adalah orang- orang yang memilih Ruksamin, sedangkan guru-guru biasa di pindahkan di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka.

#### **b). Politik Transaksional Dalam Jabatan**

Mutasi jabatan yang dilakukan pasca pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara merupakan politik balas jasa kepada guru-guru yang bersangkutan dengan mengamankan atau menaikkan kedudukannya. Sebaliknya guru-guru yang dianggap berseberangan dengan kepala daerah terpilih maka akan terancam karirnya.

Penempatan jabatan guru-guru sebagai Kepala Sekolah tidak semata- mata didasarkan atas kemampuan, keahlian, kecakapan, dan prestasi yang telah dicapai oleh pejabat tersebut, melainkan karena adanya faktor politik yang mempengaruhinya. Jabatan-jabatan tertentu diduduki oleh orang-orang yang menjadi pilihan Kepala Daerah karena orang-orang tersebut dinilai memiliki peran dalam mengantarkan Kepala Daerah untuk menduduki posisinya saat ini.

---

c). Marginalisasi Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjaka)

Mutasi jabatan di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Utara lembaga yang seharusnya bertanggung jawab dalam menyeleksi pejabat-pejabat untuk ditempatkan dalam posisi-posisi tertentu dalam pemerintahan, dipertanyakan tugas dan fungsinya. Baperjaka dinilai kurang berfungsi dengan baik karena banyak penemuan yang menyatakan bahwa tugas dan fungsi Baperjaka justru diambil alih langsung oleh Bupati.

Harusnya Baperjaka yang memilih mana yang sesuai kriteria yang kemudian diajukan kepada Bupati untuk disetujui. Jadi sebenarnya Bupati harus berpedoman pada Baperjaka. Tapi yang terjadi di Konawe Utara, Baperjaka tidaklah berfungsi dengan baik. Bupati yang memilih mana- mana orang yang dikehendaknya dan Baperjaka hanya menyetujui saja. Ketua baperjaka yang dalam hal ini adalah Sekda tidak berani untuk menolak apa yang telah diajukan oleh Bupati. Dengan demikian maka Bupati bebas menentukan dan memasukkan orang-orang pilihannya untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu tanpa melalui mekanisme yang seharusnya. Hal ini menyiratkan bahwa Baperjaka seolah hanya sebuah badan yang terdiri dari Sekda dan para anggotanya yang diakui keberadaannya tetapi tidak terlihat hasil kerjanya.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Politisasi Birokrasi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Utara**

### a). Keinginan Untuk Memperkuat Kekuasaan Politik

Mutasi jabatan yang dilakukan oleh dinas pendidikan dilakukan sesuai prosedur tetapi fakta dilapangan yang ditemukan bahwa masih banyak pengangkatan guru menjadi kepala sekolah dan pemindahan tugas di lokasi yang jauh dari tempat tinggal mereka ada keterwakilan bupati sebagai orang yang berkuasa dan beliau punya kekuasaan untuk melakukan itu.

### b). Patrimonialisme dalam hubungan eksekutif-birokrasi

Perkembangan peran perempuan sejak dibukanya demokratisasi di Indonesia tidak hanya Budaya patron-client memang sudah melekat dalam birokrasi di Konawe Utara. Bagaimana seorang birokrat menuruti perintah pemimpinnya untuk menunjukkan dedikasi dan pengabdianya agar pemimpin dapat mengamankan posisinya dalam birokrasi. Hal tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pemerintahan atau kepentingan rakyat, tetapi lebih didasarkan untuk mendapatkan imbalan. Harapannya adalah untuk membuat nama baik di depan pemimpin yang tujuannya adalah untuk menunjang karirnya dalam birokrasi. Hubungan patron-client dalam birokrasi seperti simbiosis mutualisme karena saling menguntungkan, baik bagi birokrasi maupun bagi pemimpin. Hubungan ini menguntungkan kedua belah pihak, tapi ini justru bisa merugikan kepentingan lain, seperti kepentingan birokrat lain dan juga secara tidak langsung merugikan kepentingan masyarakat. Ada banyak birokrat yang karirnya harus berakhir karena posisinya harus digantikan oleh birokrat yang menjadi client bagi pemimpin.

### c). Penekanan Lawan Politik

Faktor-faktor seperti kekeluargaan dan kekerabatan masih mendominasi dalam struktur birokrasi di Konawe Utara. Bupati lebih mementingkan orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengannya untuk ditempatkan ke dalam jajaran birokrasi. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan orang-orang yang satu frame atau memiliki pemikiran yang sama untuk menjalankan aturan yang telah ditetapkannya. Bupati mempergunakan kesempatan masa jabatan yang hanya lima tahun untuk mengisi birokrasinya dengan orang-orang terdekatnya, keluarga, dan kerabatnya. Selama orang-orang yang dipilih tersebut memenuhi syarat dan kriteria serta pengalaman untuk menjadi seorang pejabat, maka hal tersebut bukanlah sebuah masalah. Tetapi jika belum memenuhi persyaratan maka tentu

saja kinerjanya di dalam birokrasi masih dipertanyakan. Hal tersebut secara tidak langsung berdampak terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai politisasi birokrasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Utara:

1. Promosi jabatan struktural secara besar-besaran yang diintervensi oleh politik, Komersialisasi jabatan dalam penempatan jabatan yang dilakukan oleh tim sukses Bupati terhadap oknum-oknum pejabat, adanya politik transaksional atau politik balas jasa dalam penempatan pejabat-pejabat di posisi tertentu dalam jajaran Pemerintah Daerah, dan marginalisasi Baperjakat dalam mekanisme penempatan jabatan di jajaran Pemerintah Daerah justru kebalikan dari mekanisme yang seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

2. Factor-faktor yang mempengaruhi politisasi birokrasi yang terjadi di Pemerintah Daerah, antara lain: Kepentingan kekuasaan atau politik kepala daerah, hubungan patron client antara Kepala Daerah dan para birokratnya sebagai bentuk loyalitas birokrat terhadap pemimpinnya dengan imbalan jabatan yang lebih tinggi atau sekedar mengamankan posisi birokrat tersebut dalam jajaran Pemerintah, nuansa nepotisme yang masih kental terasa dalam penempatan jabatan-jabatan dalam lingkungan Pemda, dan menguatnya Neo Feodalisme atau pewarisan kekuasaan yang dilakukan didasarkan untuk memperluas kekuasaannya untuk periode berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Sary, Lia. 2012. "Politisasi Birokrasi Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Studi di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010)". Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
- Alika Yulia. 2023. Politisasi Birokrasi Dalam proses Pergantian jabatan Birokrasi Pasca Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya tahun 2022. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.
- Almendares, Nicholas., 2011, Politicization of Bureaucracy, SAGE International Encyclopedia of Political Science.
- Delly Mustafa. 2014. Birokrasi Pemerintahan. Alfabeta, Cv: Bandung.
- Fauzan, Andi Muh. Zaky. 2023. Politisasi Birokrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Barru. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
- Hasan, N. (2012). Corak Budaya Birokrasi Pada Masa Kerajaan, Kolonial Belanda Hingga Di Era Desentralisasi Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum*, 28(2), 1073–1087. Retrieved from <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Hidayati, R. N. (2012). Mutasi Aparatur Pemerintah dan Kepentingan Politik: Studi Kaasus Kabupaten Gresik Dua Tahun Kepemimpinan Sambari-Qosim. *Jurnal Politik Muda*, 2(1), 186–193.
- Iskandar, D. J. (2016). Reaktualisasi „Semangat Kepublikan Birokrasi“ Di Era Reformasi. *Jurnal Politikom Indonesia*, 13(1), 139–154.
- Jian-UGM. 2009, Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan Dan Pelayanan Publik, Gava Media: Yogyakarta.
- Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 11(02), 1667–1678.

- Kasiaheng, D. K., Kimbal, M., & Liando, D. M. (2017). Evaluasi Mutasi Jabatan Struktural Eselon Iii Dan Iv Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangehi. Eksekutif; Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 1(1), 1–12.
- Koeswinarno. (2015). Memahami Etnografi Ala Spradley. *Smart*, 1(2), 257–265. <https://doi.org/10.18784/smart.v1i2.256>
- Mathis, R.L. & Jackson, J.H., 2006. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia*, Terjemahan Dian Angelia, Salemba Empat Jakarta.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J.S. 2014. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan tjetjep Rohendi Rohidi. Depok: UI Press
- Moh. Mahfud, 1999. *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media: Yogyakarta
- Muslim Mufti. 2013. *Teori-Teori Politik*, Cv Pustaka Setia Bandung.
- Nasution, 1996. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung. Trasi
- Naufal, Jihad, 2022. *Politisasi Birokrasi Dalam Pelaksanaan Mutasi Jabatan Di Lingkungan Pemerintahan Kota Padang Tahun 2021*. Diploma thesis, Universitas Andalas.S
- Nope, N. B. (2015). *Mutasi Pejabat Fungsional Ke Dalam Jabatan Struktural Di Era Otonomi Daerah*.
- Nurprojo, I. S. (2014). Merit System dan Politik Birokrasi di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 8(1), 45–52.
- Peters, B. Guy. & Pierre, Jon., 2004. *Politicization of the Civil Service in Comparative Perspective (Perspective The Quest For Control)*, Routledge, New York.
- Romli, O. (2017). Tanpa Incumbent, Keterlibatan Politik Aparatur Birokrasi Pada Pemilukada Serentak Menurun (Studi Perbandingan Pemilukada Langsung Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Dengan Tahun 2015). *CosmoGov*, 2(1), 132–159. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11854>
- Ruitan, C. R., Mantiri, M., & Kairupan, J. (2018). *Proses Mutasi Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Kualitas Kerja (Studi Di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangehi)*. Eksekutif; Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 1(1), 1–10.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*. Cv Pustaka Setia: Bandung.
- Salim, K. (2015). *Politik Identitas di Maluku Utara Identity Politic in Maluku Utara*.
- Sarundajang. 2011. *Babak Baru Sistem Pemerintahan*, Kata Hasta Pustaka: Jakarta.
- Syafuan Rozi, 2006. *Zaman Bergerak, Birokrasi Dirombak: Potret Birokrasi Dan Politik Di Indonesia*. Pustaka Pelajar: Jakarta.
- Tampilang, J. H., Sambiran, S., & Pangemean, F. (2019). *Proses Mutasi Jabatan Eselon Iii Dan Iv Di Kabupaten Minahasa*. Eksekutif; Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 3(3), 1–9.
- Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Yustisia, 4(2), 349–368. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.2.2015.234-242>
- Nuraini, H. (2017). *Birokrasi, Kekuasaan dan Bisnis*. *Jurnal SAWALA*, 5(1), 23–27.